



Rekonstruksi Konsep Tas'ir Sebagai Instrumen Pengendalian Inflasi Beras Daerah: Studi Kabupaten Lampung Tengah dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'Ah

Linda Jayanti

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia



lindajayanti330@yahoo.com

Abstract

Tas'ir in Islamic economics is generally still discussed at the normative level regarding the permissibility of price fixing, while its relationship with regional inflation dynamics based on empirical data remains limited. Therefore, this study aims to analyze rice price fluctuations in Central Lampung Regency in 2025 and reconstruct the concept of *tas'ir* as an instrument for regional inflation control from the perspective of *maqāṣid shari'ah*. The case of Central Lampung is important to examine because it is an agrarian region and a rice production center, yet it still experienced rice price volatility during certain periods. This study employs a qualitative method with a normative-empirical approach based on document analysis. The primary data consist of the 2025 Price Development Index (*Indeks Perkembangan Harga/IPH*), policy reports of the Regional Inflation Control Team (*Tim Pengendalian Inflasi Daerah/TPID*), and Islamic economics literature. The findings reveal that rice price dynamics occurred in three phases: a stable phase from January to June, a rising phase with inflation peaking in September, and a correction phase in October. Price fluctuations were influenced by natural factors such as weather conditions, irrigation issues, and seasonal demand increases, as well as governance-related factors including inefficient distribution systems and long supply chains. In this context, *tas'ir* is no longer understood merely as direct price fixing, but rather as a corrective instrument of the state when market distortions occur, through strengthening supply, conducting market operations, maintaining food reserves, supervising distribution, and ensuring transparency of price information. This study emphasizes that the contemporary development of the concept of *tas'ir* can serve as a foundation for regional inflation control policies that are more just, adaptive, and oriented toward public welfare (*maṣlaḥah*).

Keywords: Regional Inflation, Tas'ir, Maqāṣid Shari'Ah, Maqāṣid Syarī'Ah

ARTICLE INFO

Article history:

Received

January 14, 2026

Revised

March 29, 2026

Accepted

July 08, 2026

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2026 by the authors

INTRODUCTION

Fenomena inflasi telah lama menjadi perhatian para ekonom karena merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kondisi perekonomian suatu negara (Marlina, 2025). Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Bahkan, dalam banyak aspek, ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang berada di antara kedua sistem tersebut sekaligus mengoreksi berbagai kelemahannya (Khoiry dkk., 2023). Salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan dalam suatu negara adalah tingginya tingkat inflasi yang tidak terkendali (Naqiyya dkk., 2023).

Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu daerah agraris di Provinsi Lampung memiliki kontribusi signifikan dalam produksi beras (Kurniawan & Usmanto, 2019). Namun demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta menjamin stabilitas harga beras di tingkat konsumen.

Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) tahun 2025, komoditas beras menunjukkan pola fluktuasi yang cukup signifikan pada periode tertentu. Pada awal tahun, harga beras relatif stabil dan tidak menjadi penyumbang utama inflasi daerah. Akan tetapi, memasuki pertengahan tahun, beras mulai memberikan kontribusi terhadap inflasi, seperti pada bulan Juli dengan nilai andil sebesar 0,129 pada minggu ke-1, 0,0776 pada minggu ke-2, dan 0,0661 pada minggu ke-4.

Puncak kenaikan terjadi pada bulan September, di mana beras menjadi salah satu penyumbang utama inflasi dengan nilai andil sebesar 0,8518 pada minggu ke-1, meningkat menjadi 0,8702 pada minggu ke-2, kemudian 0,8166 pada minggu ke-3, dan masih tinggi pada 0,6331 pada minggu ke-4. Kenaikan yang terjadi secara berturut-turut ini menunjukkan adanya tekanan yang kuat pada harga beras di pasar. Dalam praktiknya, harga beras di daerah ini masih mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti distribusi yang tidak merata, gangguan produksi akibat perubahan iklim, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, serta adanya praktik spekulasi dan penimbunan oleh pelaku pasar (Andini dkk., 2026). Kondisi ini berpotensi memicu inflasi daerah yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Dewi, 2025).

Penelitian sebelumnya telah membahas kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga bahan pokok dalam perspektif Islam. Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Suhardina dan Indah Khairunnisa Sihotang dalam artikel *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Menetapkan Harga Bahan Pokok Pada Perspektif Islam*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa teori harga dalam ekonomi klasik maupun modern pada dasarnya bertumpu pada mekanisme permintaan dan penawaran untuk mencapai harga keseimbangan. Namun, dalam praktiknya, sistem pasar sering menghadapi persoalan seperti inflasi, ketimpangan, dan ketidakstabilan (Suhardina & Sihotang, 2023). Oleh karena itu, pemerintah dipandang memiliki peran penting dalam melakukan intervensi melalui kebijakan al-tas'ir, yaitu penetapan harga demi menjaga keteraturan pasar (Arifin, 2026). Penelitian tersebut juga menyoroti adanya perbedaan pendapat ulama mengenai kebolehan tas'ir, di mana sebagian menolaknya karena dianggap berpotensi menimbulkan kezaliman, sedangkan sebagian lain membolehkannya apabila bertujuan mencegah monopoli dan menjaga kemaslahatan umum.

Penelitian tersebut masih berfokus pada kajian teoritis mengenai dasar hukum dan konsep tas'ir dalam perspektif Islam secara umum. Kajian tersebut belum menghubungkan konsep tas'ir dengan dinamika inflasi daerah yang nyata, khususnya fluktuasi harga beras sebagai komoditas strategis. Selain itu, pendekatan maqāṣid syarī'ah belum digunakan secara mendalam sebagai dasar untuk merekonstruksi kebijakan penetapan harga yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi kontemporer (Nurbaiti dkk., 2025). Dengan demikian, masih terdapat ruang kosong dalam literatur yang menuntut kajian lebih lanjut mengenai implementasi tas'ir dalam pengendalian inflasi daerah berbasis data empiris.

Dalam perspektif ekonomi Islam, inflasi dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya menjadi dua jenis, yaitu *natural inflation* dan *human error inflation* (Fadilla, 2017). *Natural inflation* merupakan inflasi yang terjadi karena faktor-faktor ekonomi yang bersifat alamiah, seperti masuknya aliran uang dari luar negeri dalam jumlah besar akibat peningkatan ekspor serta penurunan impor. Kondisi ini menyebabkan nilai ekspor neto meningkat sehingga mendorong naiknya permintaan agregat (Suaidah, 2023). Sementara itu, *human error inflation* adalah inflasi yang muncul akibat kesalahan serta penyimpangan perilaku manusia yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Ridha, 2021). Contohnya meliputi praktik korupsi, buruknya tata kelola administrasi pemerintahan, serta penerapan kebijakan pajak yang berlebihan, yang pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga secara umum.

Lebih lanjut, fluktuasi atau inflasi harga yang tidak stabil dapat menjadi indikasi adanya ketidakseimbangan pasar yang berpotensi merugikan Masyarakat (Nurhasanah & Nugroho, 2024). Konsep *tas'ir* sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam penetapan harga menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah ketidakadilan ekonomi. Meskipun dalam praktik awal terdapat kehati-hatian dalam penerapannya, para ulama memberikan ruang kebolehan *tas'ir* dalam kondisi tertentu demi kemaslahatan umum (Azmi, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa rekonstruksi konsep *tas'ir* sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah pada komoditas beras di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan perspektif maqāṣid syarī'ah dan basis data perkembangan harga aktual.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dinamika inflasi komoditas beras di Kabupaten Lampung Tengah, mengkaji konsep *tas'ir* dalam perspektif ekonomi Islam, serta merumuskan rekonstruksi konsep *tas'ir* yang relevan untuk pengendalian inflasi daerah berbasis maqāsid syarī'ah.. Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, tetapi juga menawarkan alternatif kebijakan yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan dalam pengendalian inflasi daerah, khususnya pada komoditas beras yang memiliki peran strategis bagi kehidupan masyarakat.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris berbasis studi dokumen untuk mengkaji rekonstruksi konsep *tas'ir* sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah pada komoditas beras di Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan fokus pada dinamika harga beras, faktor penyebab fluktuasi, konsep *natural inflation* dan *human error inflation*, serta rekonstruksi *tas'ir* berbasis maqāsid syarī'ah. Sumber data terdiri atas data primer berupa dokumen statistik resmi perkembangan harga beras, inflasi daerah, dan publikasi pemerintah tahun 2025, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, regulasi, fatwa, dan literatur ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui identifikasi pola fluktuasi harga, klasifikasi faktor penyebab inflasi berdasarkan kategori *natural inflation* dan *human error inflation*, analisis konsep *tas'ir* dalam hukum ekonomi Islam, serta sintesis seluruh temuan menggunakan kerangka maqāsid syarī'ah untuk merumuskan model pengendalian inflasi daerah yang relevan dan berkeadilan (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010).

RESULT AND DISCUSSION

1. Dinamika Inflasi Komoditas Beras di Kabupaten Lampung Tengah

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur stabilitas perekonomian suatu daerah (Juwita dkk., 2024). Dalam konteks Kabupaten Lampung Tengah sebagai daerah agraris, komoditas beras memiliki posisi strategis sebagai kebutuhan pokok Masyarakat (Ratna dkk., 2025). Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) tahun 2025 dinamika harga beras menunjukkan pola fluktuasi yang cukup signifikan, terutama pada pertengahan hingga akhir tahun.

Pada awal tahun hingga pertengahan tahun (Januari-Juni), komoditas beras belum menunjukkan peran yang signifikan dalam memengaruhi inflasi. Selama periode ini, beras tidak tercatat sebagai komoditas utama penyumbang perubahan harga, yang mengindikasikan bahwa harga beras relatif stabil. Stabilitas ini mencerminkan kondisi keseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar, sehingga tidak memberikan tekanan berarti terhadap inflasi (Indeks Perkembangan Harga Lampung Tengah 2025, t.t.).

Perubahan mulai terlihat pada bulan Juli, di mana beras mulai muncul sebagai salah satu komoditas penyumbang inflasi meskipun dengan kontribusi yang masih relatif kecil. Pada minggu pertama Juli, beras memberikan andil sebesar 0,129, kemudian menurun menjadi 0,0776 pada minggu kedua, tidak muncul pada minggu ketiga, dan kembali tercatat sebesar 0,0661 pada minggu keempat. Hal ini menunjukkan bahwa mulai terjadi tekanan harga pada beras, meskipun belum menjadi faktor dominan dibandingkan komoditas lain (Indeks Perkembangan Harga Lampung Tengah 2025, t.t.).

Memasuki bulan Agustus, beras kembali tidak menjadi komoditas utama dalam perubahan harga, seiring dengan terjadinya deflasi yang lebih banyak dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas hortikultura. Namun, kondisi ini berubah secara signifikan pada bulan September. Pada periode ini, beras menjadi salah satu penyumbang utama inflasi dengan kontribusi yang sangat besar dan konsisten setiap minggunya. Andil beras tercatat sebesar 0,8518 pada minggu pertama, meningkat menjadi 0,8702 pada minggu kedua, kemudian sedikit menurun menjadi 0,8166 pada minggu ketiga, dan kembali turun menjadi 0,6331 pada minggu keempat. Besarnya kontribusi ini menunjukkan bahwa beras menjadi faktor utama pendorong inflasi pada bulan tersebut (Indeks Perkembangan Harga Lampung Tengah 2025, t.t.).

Puncak tekanan inflasi dari komoditas beras terjadi pada bulan September, yang mengindikasikan adanya gangguan pada sisi pasokan, distribusi, atau peningkatan permintaan

yang signifikan. Kondisi ini menyebabkan harga beras naik secara tajam dan berkelanjutan dalam periode tersebut (Sari, 2025).

Selanjutnya, pada bulan Oktober terjadi pembalikan kondisi di mana beras justru menjadi penyumbang utama deflasi. Kontribusi beras terhadap penurunan harga tercatat sangat besar, yaitu sebesar -0,9221 pada minggu pertama, -0,9396 pada minggu kedua, -0,9454 pada minggu ketiga, -0,9483 pada minggu keempat, dan sekitar -0,95 pada minggu kelima. Hal ini menunjukkan adanya koreksi harga yang cukup dalam setelah lonjakan signifikan pada bulan sebelumnya (Indeks Perkembangan Harga Lampung Tengah 2025, t.t.).

Memasuki bulan November hingga awal Desember, kontribusi beras terhadap perubahan harga kembali tidak signifikan. Beras tidak lagi menjadi komoditas utama dalam inflasi maupun deflasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan harga pada beras bersifat sementara dan terkonsentrasi pada periode tertentu, khususnya pada bulan September (Indeks Perkembangan Harga Lampung Tengah 2025, t.t.).

Temuan berdasarkan data IPH tersebut sejalan dengan Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Tengah Triwulan III Tahun 2025 yang menunjukkan bahwa pada Juli inflasi *year on year* Provinsi Lampung sebesar 2,63 persen, Agustus sebesar 1,05 persen, dan September sebesar 1,17 persen. Pada periode yang sama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi masing-masing sebesar 4,44 persen, 4,12 persen, dan 5,02 persen. Hal ini menegaskan bahwa tekanan harga pangan, termasuk komoditas beras, memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan inflasi daerah (Tim Pengendalian Inflasi Daerah, 2025c).

Secara keseluruhan, pola pergerakan harga beras menunjukkan tiga fase utama, yaitu fase stabil pada awal tahun, fase kenaikan pada pertengahan tahun yang mencapai puncaknya pada September, dan fase koreksi pada Oktober. Dinamika ini menegaskan bahwa meskipun beras pada awalnya tidak berkontribusi besar terhadap inflasi, dalam kondisi tertentu komoditas ini dapat menjadi faktor dominan yang sangat memengaruhi stabilitas harga secara keseluruhan.

2. Faktor Penyebab Fluktuasi Harga Beras dan Klasifikasi Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Fluktuasi harga beras di Kabupaten Lampung Tengah tidak dapat dipahami sebagai gejala ekonomi yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor struktural, teknis, dan perilaku pasar. Meskipun daerah ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi di Provinsi Lampung, stabilitas harga beras tetap menghadapi tantangan (Palupiningrum dkk., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa besarnya produksi tidak secara otomatis menjamin keterjangkauan harga di tingkat konsumen apabila tata kelola distribusi, produksi, dan pasar belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pengendalian inflasi daerah tahun 2025, salah satu faktor utama yang memengaruhi harga beras adalah gangguan pada sektor produksi pertanian (Aissiyah & A'la, 2025). Pada Triwulan I, kondisi cuaca menjadi perhatian utama karena berpotensi mengganggu produksi bahan pangan, termasuk beras (Tim Pengendalian Inflasi Daerah, 2025a). Selanjutnya pada Triwulan II, persoalan irigasi juga menjadi faktor penting. Jadwal air yang masih bergilir, debit air yang belum maksimal akibat sedimentasi, serta kerusakan jaringan irigasi menyebabkan proses budidaya pertanian tidak berjalan optimal (Tim Pengendalian Inflasi Daerah, 2025b). Kondisi tersebut berimplikasi pada menurunnya produktivitas dan berpotensi mengurangi pasokan beras di pasar.

Pada Triwulan III, persoalan harga beras semakin menonjol. Meskipun Lampung Tengah mengalami surplus produksi beras, fluktuasi harga tetap tinggi dan beras menjadi salah satu penyumbang utama inflasi (Tim Pengendalian Inflasi Daerah, 2025c). Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan utama tidak semata terletak pada jumlah produksi, tetapi juga pada aspek distribusi, penyimpanan, dan logistik. Surplus produksi yang tidak diiringi sistem distribusi yang efisien dapat menyebabkan ketimpangan antara wilayah surplus dan wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan, sehingga harga tetap bergejolak. Dengan demikian, stabilitas harga memerlukan tata niaga yang efektif, bukan hanya peningkatan produksi.

Selain itu, laporan triwulanan juga menunjukkan adanya persoalan klasifikasi mutu beras, yaitu beras premium yang masih tercatat sebagai beras medium dalam sistem pemantauan harga. Ketidaktepatan klasifikasi tersebut berpotensi menimbulkan bias informasi pasar dan menyebabkan pembacaan harga menjadi tidak akurat (Hermanto & Saptana, 2017). Dalam konteks

kebijakan, data yang tidak presisi dapat menghambat pemerintah dalam merumuskan langkah pengendalian harga yang tepat sasaran (Tim Pengendalian Inflasi Daerah, 2025c).

Faktor eksternal juga turut memberi tekanan terhadap harga beras dan komoditas lainnya. Ketidakpastian pasar keuangan global, dampak geopolitik internasional, serta kenaikan biaya energi dan transportasi berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang (Mariyanto, 2025). Dalam struktur pasar pangan, kenaikan biaya logistik akan diteruskan ke harga akhir yang dibayar konsumen. Oleh karena itu, harga beras tidak hanya dipengaruhi faktor lokal, tetapi juga berkaitan dengan dinamika ekonomi yang lebih luas (Tim Pengendalian Inflasi Daerah, 2025c).

Pada Triwulan IV, tantangan kembali muncul melalui cuaca ekstrem dan anomali iklim yang menyebabkan penyesuaian musim tanam, penurunan luas tanam, bahkan gagal tanam di beberapa wilayah (Sholikhah & Anjani, 2023). Di sisi lain, meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, Natal, dan Tahun Baru juga mendorong kenaikan harga akibat ketidakseimbangan sementara antara permintaan dan pasokan (Imbran & Kombongkila, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga beras bersifat musiman sekaligus struktural.

Dalam perspektif ekonomi Islam, berbagai faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori inflasi, yaitu *natural inflation* dan *human error inflation* (Juanda dkk., 2024). *Natural inflation* adalah inflasi yang timbul akibat faktor alamiah atau kondisi di luar kendali manusia, seperti cuaca ekstrem, perubahan musim tanam, gangguan irigasi, peningkatan permintaan musiman, serta tekanan ekonomi global yang berdampak pada biaya distribusi. Faktor-faktor ini terjadi sebagai konsekuensi dari perubahan lingkungan ekonomi dan alam yang memengaruhi keseimbangan pasar (Andriani & Sintia, 2025).

Sementara itu, *human error inflation* merupakan inflasi yang muncul akibat perilaku manusia atau kelemahan tata kelola ekonomi (Firdaus, 2022). Dalam konteks Lampung Tengah, bentuknya dapat terlihat pada distribusi yang tidak efisien, lemahnya sistem penyimpanan dan harga logistik yang tinggi, panjangnya rantai pasok, ketidaktepatan klasifikasi mutu beras, serta kemungkinan praktik spekulatif yang menyebabkan harga bergerak melampaui kewajaran (Nurakhdan dkk., 2024). Faktor-faktor tersebut sesungguhnya dapat diminimalkan melalui kebijakan yang tepat, pengawasan pasar, serta penguatan tata kelola perdagangan.

Dengan demikian, Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa tidak semua kenaikan harga harus diperlakukan dengan kebijakan yang sama. Faktor alamiah membutuhkan respons berupa penguatan produksi domestik komoditas, infrastruktur, cadangan pangan, dan mitigasi risiko (Haryana, 2026). Sebaliknya, faktor yang bersumber dari kesalahan manusia menuntut pengawasan distribusi, penataan data, serta penegakan prinsip keadilan pasar (Fadillah dkk., 2025). Dengan demikian, analisis ekonomi Islam memberikan kerangka yang lebih komprehensif dalam membaca fluktuasi harga beras, karena tidak hanya melihat aspek ekonomi semata, tetapi juga dimensi moral, kelembagaan, dan kemaslahatan masyarakat.

3. Relevansi Konsep Tas'ir dalam Pengendalian Inflasi

Konsep *tas'ir* dalam ekonomi Islam merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam menetapkan harga untuk menjaga keadilan pasar (Komarudin & Syantoso, 2022). Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW pada awalnya tidak menetapkan harga ketika kenaikan terjadi secara alami. Namun, para ulama menegaskan bahwa larangan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat situasional dan bergantung pada tertentu, khususnya ketika terjadi distorsi pasar seperti monopoli, penimbunan, dan ketidakadilan. Pemahaman ini didasarkan pada praktik Rasulullah Saw yang dalam kondisi tertentu justru melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan prinsip syariah, selama bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kemudharatan (Baharuddin & Islamy, t.t.).

Dalam dinamika harga beras di Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan data IPH, harga beras relatif stabil pada Januari–Juni, mulai mengalami tekanan pada Juli, mencapai puncak inflasi pada September, dan mengalami koreksi pada Oktober. Pola ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu menjaga kestabilan harga secara berkelanjutan. Pada saat tertentu, beras dapat menjadi faktor dominan yang memengaruhi inflasi daerah sehingga memerlukan respons kebijakan yang cepat dan tepat (Indeks Perkembangan Harga Lampung Tengah 2025, t.t.).

Kenaikan harga beras tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor struktural yang telah diidentifikasi dalam laporan pengendalian inflasi daerah, seperti gangguan produksi akibat cuaca, persoalan irigasi, distribusi yang belum efisien, panjangnya rantai pasok, serta meningkatnya

permintaan masyarakat pada periode tertentu (Fatmawati dkk., 2024). Meskipun Lampung Tengah merupakan daerah surplus produksi beras, fakta bahwa harga tetap berfluktuasi menunjukkan adanya persoalan dalam tata niaga dan distribusi.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme pasar tidak sepenuhnya mampu menciptakan harga yang adil (*tsaman al-mithl*) (Muhammad, 2024). Ketika mekanisme pasar mengalami gangguan, intervensi pemerintah melalui kebijakan stabilisasi harga menjadi relevan dan bahkan diperlukan. Dalam konteks Lampung Tengah, pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain perluasan tanam padi dan panen raya untuk memperkuat pasokan, penguatan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) beras medium, pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah, penguatan cadangan pangan daerah, serta kerja sama antar daerah guna menjaga kesinambungan pasokan. Selain itu, pemerintah juga mendorong kelancaran distribusi melalui inovasi sistem logistik, digitalisasi pemasaran UMKM pangan, penyediaan informasi harga berbasis digital, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta pengawasan langsung terhadap pasokan beras di pasar strategis (Tim Pengendalian Inflasi Daerah, 2025c).

Dalam perspektif ekonomi Islam, langkah-langkah tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk implementasi *tas'ir* yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*). Intervensi ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan pasar secara mutlak, melainkan sebagai mekanisme korektif terhadap kegagalan pasar (market failure). Esensi *tas'ir* tidak semata terletak pada penetapan angka harga secara kaku, tetapi pada kehadiran otoritas yang menjamin keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, serta terciptanya keadilan bagi produsen dan konsumen (Muhammad, 2024).

Lebih lanjut, kebijakan penguatan produksi, pengawasan distribusi, stabilisasi pasokan, dan penyediaan informasi harga yang dilakukan pemerintah daerah menunjukkan bahwa konsep *tas'ir* dalam konteks kontemporer dapat diwujudkan melalui instrumen kebijakan yang lebih luas daripada sekadar penetapan harga langsung. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*) dan mencegah kerugian masyarakat akibat gejolak harga pangan.

Dengan demikian, konsep *tas'ir* dalam ekonomi Islam terbukti memiliki relevansi yang kuat dalam pengendalian inflasi, khususnya ketika komoditas strategis seperti beras mengalami fluktuasi yang mengganggu kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Lampung Tengah, intervensi pemerintah merupakan instrumen korektif yang sah dan diperlukan untuk menjaga keadilan (*al-'adl*), stabilitas ekonomi, dan perlindungan kepentingan publik merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip syariah, karena bertujuan menjaga keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*). Dengan demikian, *tas'ir* tidak dimaknai sebagai pembatasan kebebasan pasar secara mutlak, melainkan sebagai instrumen korektif yang sah dan diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta memastikan stabilitas ekonomi.

4. Rekonstruksi Tas'ir dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah

Dalam upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, para ulama usul fikih merumuskan tujuan utama syariat (*maqāsid al-syarī'ah*) sebagai dasar pengaturan kehidupan manusia (Dahri dkk., 2026). Tujuan tersebut diarahkan pada perlindungan unsur-unsur pokok kehidupan, yaitu agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dalam konteks ekonomi, perlindungan jiwa dan harta memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan stabilisasi harga pangan, sebab kenaikan harga kebutuhan pokok dapat menurunkan daya beli, mempersempit akses masyarakat terhadap pangan, serta mengganggu kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, konsep *tas'ir* perlu dipahami sebagai instrumen kebijakan yang bertujuan menjaga kemaslahatan umum (Suhaimi dkk., 2023).

Konsep *tas'ir* dalam khazanah ekonomi Islam pada mulanya dipahami sebagai intervensi pemerintah dalam penetapan harga ketika terjadi ketidakadilan di pasar (Yunus & Rani, 2020). Namun, dalam konteks perekonomian modern, persoalan harga tidak lagi berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan produksi, distribusi, cadangan stok, akses informasi, dan perilaku pasar. Karena itu, *tas'ir* tidak cukup dimaknai hanya sebagai penetapan nominal harga, tetapi perlu dipahami sebagai seluruh kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga harga tetap wajar dan terjangkau bagi Masyarakat (Wahyu, 2018).

Ketika terjadi lonjakan harga akibat gangguan produksi, distribusi yang tidak lancar, rantai pasok yang panjang, penimbunan, atau ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, pemerintah memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi. Intervensi tersebut bukan dimaksudkan menghapus mekanisme pasar, tetapi mengembalikan fungsi pasar agar berjalan

secara adil, efisien, dan tidak merugikan masyarakat luas. Dalam hal ini, negara berperan sebagai pengawas sekaligus penyeimbang ketika pasar mengalami distorsi (Rahman dkk., 2025).

Dalam sistem pemerintahan modern, pelaksanaan kebijakan pengendalian harga tersebut melibatkan berbagai aktor yang saling bersinergi, seperti Pemerintah Daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Perum Bulog, Satgas Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Yopiannor, 2025). Keterlibatan berbagai lembaga tersebut menunjukkan bahwa stabilisasi harga pangan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor agar kebijakan yang diambil efektif dari sisi produksi, distribusi, pengawasan, hingga perlindungan konsumen (Tim Pengendalian Inflasi Daerah, 2025c).

Dalam konteks Kabupaten Lampung Tengah, fluktuasi harga beras tahun 2025 menunjukkan bahwa surplus produksi tidak otomatis menjamin kestabilan harga. Meskipun daerah ini merupakan salah satu sentra produksi padi, harga beras tetap mengalami kenaikan pada periode tertentu. Hal tersebut menunjukkan adanya faktor lain di luar produksi, seperti persoalan distribusi, irigasi, cuaca, serta meningkatnya permintaan masyarakat pada waktu tertentu. Kondisi ini menegaskan bahwa pengendalian harga memerlukan kebijakan yang lebih komprehensif.

Bentuk kebijakan yang sejalan dengan konsep *tas'ir* dapat diwujudkan melalui penguatan produksi pertanian, penyediaan cadangan pangan pemerintah, operasi pasar, gerakan pangan murah, kerja sama antar daerah, pengawasan distribusi, penyediaan informasi harga yang transparan, serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan (Salma dkk., 2026). Kebijakan tersebut merupakan bentuk intervensi yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini, karena tidak terbatas pada penetapan harga secara langsung, tetapi menyentuh akar persoalan yang menyebabkan gejolak harga (Tim Pengendalian Inflasi Daerah, 2025c).

Dengan demikian, *tas'ir* dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah* tidak hanya dipahami sebagai kebijakan penetapan harga, melainkan sebagai instrumen negara untuk menjaga keadilan pasar, melindungi masyarakat, dan mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam konteks pengendalian inflasi daerah, pendekatan ini menjadi penting agar stabilitas ekonomi dapat tercapai secara berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

DISCUSSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga beras di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 tidak hanya dipengaruhi oleh faktor produksi semata, tetapi juga oleh persoalan distribusi, tata kelola pasar, dan dinamika permintaan musiman. Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH), harga beras mengalami tiga fase utama, yaitu fase stabil pada Januari–Juni, fase kenaikan pada Juli–September dengan puncak inflasi pada September, serta fase koreksi pada Oktober. Temuan ini memperlihatkan bahwa komoditas beras memiliki posisi strategis dalam pembentukan inflasi daerah, sehingga membutuhkan mekanisme pengendalian yang tidak hanya bertumpu pada mekanisme pasar bebas. Dalam konteks tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa konsep *tas'ir* dalam ekonomi Islam tetap relevan sebagai instrumen korektif negara untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi kepentingan masyarakat.

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi konsep *tas'ir* tidak hanya sebagai kebijakan penetapan harga secara langsung, tetapi sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah yang bersifat komprehensif melalui penguatan pasokan, stabilisasi distribusi, pengawasan pasar, penyediaan cadangan pangan, serta transparansi informasi harga berbasis *maqāsid syarī'ah*. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang umumnya masih normatif dan berfokus pada perdebatan hukum kebolehan *tas'ir*, penelitian ini menghubungkan konsep tersebut dengan data empiris fluktuasi harga beras di daerah agraris. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa *tas'ir* dalam konteks ekonomi kontemporer dapat diwujudkan melalui kebijakan stabilisasi pasar yang lebih adaptif dan sistematis.

Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan sejumlah penelitian terdahulu. Penelitian Muhammad Alif dan Muhammad Iqbal menegaskan bahwa intervensi pemerintah dalam penetapan harga beras melalui konsep *tas'ir* al-jabari diperbolehkan apabila terjadi manipulasi pasar atau kenaikan harga yang tidak wajar, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan bagi pedagang dan konsumen (Alif & Iqbal, 2024). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian ini yang menunjukkan pentingnya intervensi pemerintah ketika terjadi fluktuasi harga beras di Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian Ahmad Zaini juga menyatakan bahwa *ihtikār* dan *tas'ir* dapat diberlakukan dalam kondisi pasar yang tidak stabil demi menjaga kemaslahatan masyarakat serta mencegah

praktik monopoli dan penimbunan (Zaini, 2018). Selanjutnya, penelitian Maisyah Hawanda, Atika, dan Khairina Tambunan menunjukkan bahwa kebijakan stabilisasi harga mampu memperkuat daya beli masyarakat apabila dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam (Hawanda dkk., 2024). Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian Yuzril Mahendra dan Muhamad Zen yang menegaskan bahwa pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi harga untuk menjaga stabilitas pasar, mencegah ihtikār, dan mewujudkan kemaslahatan umum (Mahendra & Zen, 2025). Selain itu, penelitian Suhardina dan Indah Khairunnisa Sihotang menjelaskan bahwa mekanisme pasar dalam praktiknya sering menghadapi persoalan inflasi, ketimpangan, dan monopoli sehingga pemerintah perlu melakukan intervensi harga demi menjaga keseimbangan pasar (Suhardina & Sihotang, 2023). Penelitian Mhd. Erwin Munthe juga menegaskan bahwa negara memiliki peran penting dalam melindungi konsumen dan pelaku usaha melalui mekanisme penetapan harga guna mencegah persaingan usaha tidak sehat dan menjaga kesejahteraan masyarakat (Munthe, 2018). Seluruh penelitian tersebut mendukung hasil penelitian ini bahwa stabilitas harga beras tidak dapat dilepaskan dari peran negara dalam mengoreksi distorsi pasar dan menjaga kemaslahatan publik.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan beberapa perbedaan dibandingkan penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pendekatan normatif-doktrinal mengenai hukum tas'ir, mekanisme pasar, dan legitimasi intervensi negara dalam perspektif ekonomi Islam. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris berbasis data perkembangan harga aktual di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025. Perbedaan metodologi tersebut menghasilkan temuan yang lebih kontekstual dan aplikatif terhadap dinamika inflasi daerah. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya membahas konsep tas'ir dalam lingkup teori ekonomi Islam secara umum, stabilisasi harga nasional, atau perlindungan konsumen, sedangkan penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada komoditas beras sebagai penyumbang utama inflasi daerah. Perbedaan konteks wilayah penelitian juga memengaruhi hasil kajian, karena Lampung Tengah sebagai daerah surplus produksi beras ternyata tetap mengalami fluktuasi harga akibat persoalan distribusi, irigasi, rantai pasok, dan tata niaga yang belum optimal.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor natural inflation dan human error inflation dalam dinamika harga beras. Faktor alamiah seperti cuaca ekstrem, gangguan irigasi, dan peningkatan permintaan musiman memiliki kesamaan dengan temuan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa inflasi pangan dipengaruhi oleh kondisi produksi dan distribusi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa faktor tata kelola, distribusi yang tidak efisien, dan ketidakseimbangan pasar memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap gejolak harga di daerah surplus produksi. Dengan demikian, perbedaan hasil penelitian dipengaruhi oleh konteks wilayah, pendekatan penelitian, jenis data yang digunakan, serta fokus kajian yang lebih spesifik pada pengendalian inflasi daerah berbasis maqāsid syarī'ah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi konsep tas'ir yang tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai penetapan harga langsung oleh pemerintah, melainkan sebagai instrumen korektif negara dalam menjaga stabilitas harga melalui penguatan pasokan, operasi pasar, pengawasan distribusi, cadangan pangan, transparansi informasi harga, dan penguatan tata niaga berbasis maqāsid syarī'ah. Penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan normatif ekonomi Islam dengan analisis empiris berbasis data Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025, sehingga menghasilkan model pengendalian inflasi daerah yang lebih kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi daerah, khususnya pada komoditas beras, tidak cukup dilakukan hanya melalui mekanisme pasar semata, tetapi memerlukan keterlibatan aktif pemerintah dalam menjaga keseimbangan distribusi, pasokan, dan akses masyarakat terhadap pangan. Secara akademis, penelitian ini memperkaya kajian ekonomi Islam mengenai relevansi tas'ir dalam konteks inflasi daerah modern. Secara praktis dan kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah, TPID, dan lembaga terkait untuk memperkuat kebijakan stabilisasi harga berbasis keadilan dan kemaslahatan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods, memperluas objek penelitian pada komoditas pangan strategis lainnya, serta mengkaji efektivitas implementasi kebijakan tas'ir kontemporer dalam pengendalian inflasi di berbagai daerah.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa harga beras di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 mengalami tiga fase, yaitu stabil pada awal tahun, meningkat hingga puncak pada September, dan terkoreksi pada Oktober. Fluktuasi tersebut dipengaruhi faktor alamiah seperti cuaca, irigasi, dan musim tanam, serta faktor struktural seperti distribusi yang belum efisien, rantai pasok panjang, dan kenaikan permintaan musiman. Dalam ekonomi Islam, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep *natural inflation* dan *human error inflation*.

Secara teoretik, penelitian ini menegaskan bahwa konsep *tas'ir* dalam ekonomi Islam kontemporer tidak hanya dimaknai sebagai penetapan harga, tetapi sebagai instrumen kebijakan untuk mengoreksi kegagalan pasar, menjaga keterjangkauan harga, dan menjamin ketersediaan pangan sesuai tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Secara praktis, pemerintah daerah, Bulog, dan TPID perlu memperkuat produksi, cadangan pangan, distribusi, operasi pasar, serta transparansi data harga agar pengendalian inflasi lebih efektif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada komoditas beras, menggunakan dominan data sekunder, dan terbatas pada wilayah Lampung Tengah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek kajian, menggunakan data lapangan, dan melakukan perbandingan antar daerah.

REFERENCES

- Aissiyah, R., & A'la, U. H. (2025). Dampak Kenaikan Harga Beras Terhadap Lingkungan Masyarakat Pada Tahun 2018-2023. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(1), 80–91. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i1.3406>
- Alif, M., & Iqbal, M. (2024). The Effect Of The Price Setting Of Rice By Bulog Banda Aceh On The Rice Market Mechanism In The Concept Of Tas'ir Al-Jabari. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 325–351. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i1.5535>
- Andini, N. P., Kirawa, Z. A., Cahaya, R. D., Syafa, M. S., & Fahlapi, R. (2026). Analisis Flutuaksi Harga Beras Periode Bulan Oktober 2024-September 2025. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.6638>
- Andriani, R., & Sintia, G. (2025). Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *UNCANG : Journal of Sharia Banking and Islamic Finance*, 1(2), 103–113. <https://doi.org/10.30983/uncang.v1i2.10412>
- Arifin, A. F. I. (2026). Intervensi Pemerintah Terhadap Tas'ir Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Keislaman Terateks*, 11(1), 1–8.
- Azmi, N. (2022). Aktualisasi Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Mekanisme Tas'ir. *Journal of Sharia Economics*, 3(2), 83–98. <https://doi.org/10.22373/jose.v3i2.1851>
- Baharuddin, D., & Islamy, M. R. F. (t.t.). *Relevansi Hadis Tas'ir (Penetapan Harga) Terhadap Sistem Perekonomian Di Indonesia*. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v7i2.10525>
- Dahri, M. A., Rahman, A. F., Putra, F., & Kurniati, K. (2026). Rekonstruksi Maqasid Syariah: Relevansi dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 3(1), 14–22. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1492>
- Dewi, I. K. (2025). Strategi Kebijakan Badan Pangan Nasional Melalui Pendekatan Berbasis Spasial Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Pasokan Dan Harga Pangan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 8(5), 2782–2802. <https://doi.org/10.31539/4nj7bw91>
- Fadilla, F. (2017). Perbandingan Teori Inflasi dalam Perspektif Islam dan Konvensional. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(2), 1–14. <https://doi.org/10.36908/isbank.v2i2.27>

- Fadillah, A., Putri, S. A. M., & Himayatillah, H. I. (2025). Peran Pemerintah dalam Pengawasan Harga Pangan Perspektif Ekonomi Islam. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(3), 324–344. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1666>
- Fatmawati, K., Rahmawati, D. N., Dalya, P., & Saodin. (2024). Analisis Perubahan Cuaca Terhadap Kenaikan Harga Beras. *MUHKAL*, 2(2), 31–37. <https://doi.org/10.52655/muhkal.v2i2.18>
- Firdaus, A. R. G. (2022). Inflasi: Telaah Pemikiran Ekonomi Islam Al-Maqrizi Dan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19. *Karaton: Jurnal Pembangunan Sumenep*, 1(2), 278–287. <https://bappeda.sumenepkab.go.id/jurnal/index.php/karaton/article/view/29>
- Haryana, A. (2026). Komoditas Strategis dan Hilirisasi Pertanian sebagai Pilar Transformasi Ekonomi Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 9(1), 53–72. <https://doi.org/10.47266/bwp.v9i1.537>
- Hawanda, M., Atika, A., & Tambunan, K. (2024). Islamic Economic Approach to Strengthening Public Purchasing Power through Price Stabilisation Policy. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 11(2), 151–163. <https://doi.org/10.21107/dinar.v11i2.25930>
- Hermanto, nFN, & Saptana, nFN. (2017). Kebijakan Harga Beras Ditinjau dari Dimensi Penentu Harga. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 35(1), 31–43. <https://doi.org/10.21082/fae.v35n1.2017.31-43>
- Imbran, H., & Kombongkila, F. (2025). Dampak Kenaikan Harga Bahan Pokok Terhadap Daya Beli Masyarakat Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. *JPPE: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi*, 7(2), 51–58. <https://doi.org/10.31314/jppe.v7i2.3906>
- Indeks Perkembangan Harga Lampung Tengah 2025*. (t.t.). Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dan bagian perekonomian Setdakab Lampung Tengah.
- Juanda, E., Salsabila, E. T., Sidik, M., & Hidayat, F. (2024). Kebijakan Fiskal Moneter Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(3), 117–126. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i3.3943>
- Juwita, J., Resnawati, R., Safaringga, A. H., & Anggraini, F. (2024). Faktor Pendorong Inflasi Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. *Journal of Economic Education*, 3(1), 13–19. <https://doi.org/10.22437/jeec.v3i1.22726>
- Khoiry, K. A., Hafiz, M. A. S., & Ariansyah, N. R. (2023). Perbandingan Antara Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional: Kelebihan dan Kekurangan. *Islamic Education*, 1(3), 446–455.
- Komarudin, P., & Syantoso, A. (2022). Konsep Tas'ir (Penetapan Harga Oleh Negara) Menurut Para Ulama. *Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB*, (1). <https://doi.org/10.31602/ppdu.v0i1.8223>
- Kurniawan, S. A., & Usmanto, B. (2019). Komoditas Unggulan Hasil Pertanian Di Daerah Lampung Tengah Berbasis Client Server Dengan Platform Android. *PROCIDING KMSI*, 7(1). <https://jurnal.ftikomibn.ac.id/index.php/kmsi/article/view/818>
- Mahendra, Y., & Zen, M. (2025). Tas'ir Perspektif Fiqh Klasik Dan Kontemporer Serta Relevansinya Dalam Kebijakan Ekonomi Syariah Negara. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 17(2), 143–162. <https://doi.org/10.20414/mu.v17i2.14467>
- Mariyanto, J. (2025). Krisis Global dan Implikasinya bagi Pertanian Indonesia: Perubahan Iklim, Konflik Geopolitik, dan Spekulasi Pasar. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian*, 2(1), 22–43.

- Marlina, S. (2025). Analisis Model Matematika dalam Prediksi Inflasi di Negara Berkembang. *Jurnal Matematika Dan Aplikasi*, 1(1), 8–14. <https://ejournal.samudrailmu.com/index.php/jma/article/view/13>
- Muhammad, F. R. (2024). The Role Of The Government In Maintaining The Availability Of Rice In The Market In Aceh, Indonesia: A Theoretical Study Of Tas'ir Al-Jabari. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 208–231. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i1.4699>
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Munthe, M. E. (2018). Kemaslahatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Melalui Mekanisme Penetapan Harga Oleh Negara. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 9(2), 217–243. <https://doi.org/10.18860/j.v9i2.5593>
- Naqiyya, A. N., Hidayati, N., Widamayanti, S. E., & Marwati, S. D. (2023). Pengendalian Inflasi Di Indonesia Perspektif M. Umer Chapra. *Istithmar*, 7(1), 50–65. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i1.637>
- Nurakhdan, R., Dwihanggara, M. D., Pratama, I. A., & Wikansari, R. (2024). Dampak Harga Logistik Yang Tinggi Bagi Komoditi Beras. *Investama : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(01), 39–54. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v10i01.1335>
- Nurbaiti, T. A., Rahmayanti, V., & Mu'is, A. (2025). Maqashid Al Syariah dalam ekonomi kontemporer negara Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(11), 1372–1378.
- Nurhasanah, H., & Nugroho, F. A. (2024). Menghadapi Inflasi: Strategi Pengendalian Dan Dampak Terhadap Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(2), 56–72. <https://doi.org/10.55606/optimal.v4i2.3331>
- Palupiningrum, A. W., Suhendi, Watazawwadu'llmi, S., & Holis, A. (2025, Februari 13). Penguatan Ketahanan Pangan Melalui Rantai Nilai Beras: Studi Kasus Provinsi Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara Dan Sumatera Selatan. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/396099725_PENGUATAN_KETAHANAN_PANGAN_MELALUI_RANTAI_NILAI_BERAS_STUDI_KASUS_PROVINSI_LAMPUNG_NUSA_TENGGARA_TIMUR_SULAWESI_TENGGARA_DAN_SUMATERA_SELATAN
- Rahman, A., Zakiyah, M., & Anwar, K. (2025). Intervensi Pemerintah Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 104–112. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v3i1.7885>
- Ratna, R., Fitriani, F., & Kartahadimaja, J. (2025). Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Padi dan Prognosis Ketersediaan Pangan di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. *Jurnal Agribest*, 9(1), 10–27. <https://doi.org/10.32528/agribest.v9i1.2355>
- Ridha, M. (2021). Inflasi Berdasarkan Pandangan M. Umer Chapra. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 114–136. <https://doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4089>
- Salma, A. N., Ayu, D. L., Febrianti, G., Nurmasitah, S., & Kusumo, A. F. (2026). Implementasi Kebijakan Gerakan Pangan Murah dalam Mendukung Stabilitas Harga Pangan Menjelang HBKN di Kota Semarang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 9472–9477. <https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.38041>
- Sari, I. F. (2025). Analisa Faktor-Faktor Tentang Tingginya Harga Beras Dan Upaya Penyelesaiannya Menurut Siyasaah Maliyah. *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum*, 2(1), 44–58. <https://doi.org/10.22437/jphk.v2i1.34737>
- Sholikhah, M., & Anjani, M. D. (2023). Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kenaikan Harga Beras di Indonesia. *Journal of Economics and Social Sciences (JESS)*, 2(2), 122–130. <https://doi.org/10.59525/jess.v2i2.311>

- Suaidah, S. (2023). Inflasi Menurut Al-Maqrizi. *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 17–30.
- Suhaimi, S., Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). Al-Maqâshid Al-Syarî'ah Teori Dan Implementasi. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 2(1), 153–170. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>
- Suhardina, S., & Sihotang, I. K. (2023). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Menetapkan Harga Bahan Pokok Pada Perspektif Islam. *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 1–16.
- Tim Pengendalian Inflasi Daerah. (2025a). *Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Tengah Triwulan I Tahun 2025*.
- Tim Pengendalian Inflasi Daerah. (2025b). *Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Tengah Triwulan II Tahun 2025*.
- Tim Pengendalian Inflasi Daerah. (2025c). *Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Tengah Triwulan III Tahun 2025*.
- Wahyu, A. R. M. (2018). Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas'ir. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(2), 230–263. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.620>
- Yopiannor, F. Z. (2025). Kolaborasi Aktor Dalam Upaya Pengendalian Inflasi Daerah di Kota Palangka Raya. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 4(2), 175–181. <https://doi.org/10.55850/symbol.v4i2.256>
- Yunus, F. M., & Rani, S. M. (2020). Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Mekanisme Harga Analisis tentang Proteksi Harga Pala dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 133–149. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i2.1291>
- Zaini, A. (2018). Ihtikar dan Tas'ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 187–198. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5091>